



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019 telah mendapat persetujuan bersama DPRD pada tanggal 8 Juli 2020 dan telah dilakukan evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 4 Agustus 2020;
- c. bahwa Gubernur bersama DPRD telah melaksanakan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019 sesuai Hasil Evaluasi Menteri Dalam Negeri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019; *u*

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 632);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0075);
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor 015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 007);


Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019 berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2019;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2019;
 - c. Neraca per 31 Desember 2019;
 - d. Laporan Operasional per 31 Desember 2019;
 - e. Laporan Arus Kas per 31 Desember 2019;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2019; dan
 - g. Catatan atas laporan keuangan per 31 Desember 2019.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah per 31 Desember 2019. 

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

| | | | |
|-------------------|-----|----------------------|---|
| a. Pendapatan | Rp. | 5.354.092.405.679,30 | |
| b. Belanja | Rp. | 5.277.064.650.987,30 | - |
| Surplus / defisit | Rp. | 77.027.754.692,00 | |
| c. Pembiayaan | : | | |
| ⇒ Penerimaan | Rp. | 216.350.973.249,55 | |
| ⇒ Pengeluaran | Rp. | 10.748.964.000,00 | - |
| Pembiayaan Netto | Rp. | 205.602.009.249,55 | |

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp.(206.963.946.869,-) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Rp. 5.561.056.352.548,00
 - b. Realisasi Rp. 5.354.092.405.679,30
 - Selisih lebih / (kurang) Rp. (206.963.946.869,-)
- (2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp.(492.742.913.389,-) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Belanja setelah perubahan Rp. 5.769.807.564.376,55
 - b. Realisasi Rp. 5.277.064.650.987,30
 - Selisih lebih / (kurang) Rp. (492.742.913.389,-)
- (3) Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/ Defisit sejumlah Rp.285.778.966.521,- dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Surplus/ defisit setelah perubahan Rp. (208.751.211.828,55)
 - b. Realisasi Rp. 77.027.754.692,00
 - Selisih lebih / (kurang) Rp. 285.778.966.521,-
- (4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp.(3.200.238.579,-) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp. 219.551.211.828,55
 - b. Realisasi Rp. 216.350.973.249,55
 - Selisih lebih / (kurang) Rp. (3.200.238.579,-)
- (5) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp.(51.036.000,-) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp. 10.800.000.000,00
 - b. Realisasi Rp. 10.748.964.000,00
 - Selisih lebih / (kurang) Rp. (51.036.000,-)
- (6) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayan Netto sejumlah Rp.(3.149.202.579,-) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp. 208.751.211.828,55
 - b. Realisasi Rp. 205.602.009.249,55
 - Selisih lebih / (kurang) Rp. (3.149.202.579,-)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b sebagai berikut :

| | | |
|--|-----|--------------------|
| a. Saldo Anggaran Lebih Awal | Rp. | 212.794.972.828,55 |
| b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan | Rp. | 212.794.972.828,55 |
| c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) | Rp. | 282.629.763.941,55 |
| d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya | Rp. | —,- |
| e. Lain - lain | Rp. | —,- |
| f. Saldo Anggaran Lebih Akhir | Rp. | 282.629.763.941,55 |

Pasal 5

Neraca, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c sebagai berikut :

| | | |
|---------------------|-----|----------------------|
| a. Jumlah Aset | Rp. | 9.148.346.887.827,31 |
| b. Jumlah Kewajiban | Rp. | 56.929.422.509,42 |
| c. Jumlah Ekuitas | Rp. | 9.091.417.465.317,89 |

Pasal 6

Laporan Operasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d sebagai berikut :

| | | |
|--|-----|----------------------|
| (1) Pendapatan - LO | Rp. | 5.481.692.339.534,12 |
| a. Pendapatan Asli Daerah - LO | Rp. | 1.319.007.629.966,04 |
| b. Pendapatan Transfer - LO | Rp. | 4.067.952.844.498,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah- LO | Rp. | 27.180.607.893,00 |
| d. Surplus Non Operasional - LO | Rp. | 6.633,00 |
| e. Pendapatan Non Operasional - LO | Rp. | 67.551.250.544,08 |
| (2) Beban - LO | Rp. | 4.920.673.818.981,57 |
| a. Beban Operasi - LO | Rp. | 4.449.823.559.372,07 |
| b. Beban Transfer - LO | Rp. | 470.850.259.609,50 |
| (3) Surplus/Defisit | Rp. | 561.018.520.552,55 |

Pasal 7

Laporan Arus Kas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut :

| | | |
|---|-----|----------------------|
| a. Saldo Kas awal per 1 Januari Tahun 2019 | Rp. | 212.794.972.828,55 |
| b. Arus Kas bersih dari aktivitas operasi | Rp. | 875.180.981.189,00 |
| c. Arus Kas bersih dari aktivitas investasi Aset Non Keuangan | Rp. | (798.153.226.497,00) |
| d. Arus Kas bersih dari aktivitas pendanaan | Rp. | (7.192.963.579,00) |
| e. Arus Kas bersih dari aktivitas transitoris | Rp. | —,- |
| f. Saldo Kas akhir per 31 Desember Tahun 2019 | Rp. | 282.629.763.941,55 |

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f sebagai berikut :


| | | | |
|----|---|-----|----------------------|
| a. | <i>Ekuitas Awal</i> | Rp. | 7.413.186.778.406,25 |
| b. | <i>Surplus/Defisit - LO</i> | Rp. | 561.018.520.552,55 |
| c. | <i>Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar</i> | Rp. | 1.117.212.166.359,09 |
| - | <i>Dampak Perubahan Nilai Persediaan</i> | Rp. | (2.065.716.451,00) |
| - | <i>Dampak Perubahan Aset Tetap</i> | Rp. | 1.208.407.545.640,31 |
| - | <i>Dampak Perubahan Atas Penyusutan</i> | Rp. | (26.270.196.874,82) |
| - | <i>Dampak Perubahan Atas Investasi</i> | Rp. | (58.057.296.427,12) |
| - | <i>Dampak Perubahan Atas Kapitalisasi</i> | Rp. | (1.015.915.677,00) |
| - | <i>Dampak Perubahan Atas Penyisihan</i> | Rp. | 7.168.331.523,02 |
| - | <i>Dampak Perubahan Atas Utang</i> | Rp. | 20.250.128,70 |
| - | <i>Dampak Perubahan Atas Aset Lain</i> | Rp. | (1.840.601.279,00) |
| - | <i>Dampak Perubahan Atas Piutang</i> | Rp. | (9.134.234.224,00) |
| d. | <i>Jumlah Ekuitas Akhir</i> | Rp. | 9.091.417.465.317,89 |

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka pengelolaan Keuangan Negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; 

- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah;
- u. Lampiran XXI : Daftar Pinjaman Daerah;
- v. Lampiran XXII : Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan Jabatan.

Pasal 11

- (1) Lampiran Laporan Keuangan berupa Laporan Kinerja BUMD/Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tercantum dalam Laporan Keuangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran Laporan Keuangan berupa Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tercantum dalam Laporan Keuangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12


Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2019.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.


Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 14 Agustus 2020

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


 **VIKTOR BUNGILU LAISKODAT**

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 14 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH

 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.


 **BENEDIKTUS POLO MAING**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2020
NOMOR 004

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR :
(4-93/2020)